

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dan Destinasi Wisata Kawung Tilu Bojong Rangkas dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi pustaka dapat disimpulkan bahwa:

Tahap pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Pelaku pariwisata di Kawung Tilu Bojong Rangkas Belum berjalan secara optimal. Berdasarkan teori James Brian Quinn (dalam Mintzberg, Lampel, Quinn, Ghoshal, 2003) ada tiga indikator Strategi, yaitu: Tujuan, Kebijakan, Program.

1. Strategi sebagai Tujuan. Ada dua (2) aspek meliputi yaitu sosialisasi pengembangan dan rapat koordinasi, hasil dari indikator strategi sebagai tujuan dalam pelaksanaannya pada kedua sub indikator tersebut belum maksimal dari aspek sosialisasi, skala yang dilakukan masih luas dan pada rapat koordinasi masih secara keseluruhan belum spesifik ke masing-masing setiap destinasi wisata.
 - a) sosialisasi pengembangan destinasi wisata Kawung Tilu, Khususnya bidang pengembangan SDM. Materi sosialisasi, meliputi (1) Regulasi Kepariwisata, (2) Mekanisme pembinaan kepariwisataan, dan (3) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Pokdarwis, pengelola wisata). Sementara itu tahapan yang dilakukan, meliputi: (1) Rapat Koordinasi persiapan sosialisasi 4 kali/Tahun; (2) Memberikan Undangan kepada stakeholder dan narasumber; (3) Pelaksanaan Sosialisasi; (4) Monitoring dan Evaluasi. Akan Tetapi, dari pola sosialisasi diatas, belum optimal melakukan sosialisasi yang luas diantaranya adalah (1) Penggunaan media internet, website, Aplikasi

Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. (2) Sosialisasi melalui kegiatan Kepariwisata, Yang dilakukan dengan leaflet, booklet, Brosur dan sebagainya dan (3) aktivitas Event organizer dan kegiatan lainnya.

- b) rapat koordinasi Dinas Pariwisata dengan pelaku wisata. Pola Koordinasi yang dilakukan meliputi : (1) Melakukan kunjungan ke lokasi atau mengundang rapat koordinasi; (2) Melakukan diskusi kelompok terfokus (*focus Group Discussion-FGD*) dan (3) pembinaan dan penggalan pengembangan SDM kepariwisataan. Akan tetapi, pola Koordinasi diatas, dalam pelaksanaannya hanya sebatas koordinasi secara keseluruhan pengelola dan pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Bekasi belum secara spesial atau spesifik ke setiap destinasi wisata, khususnya wisata Kawung Tilu.

- 2. Strategi sebagai kebijakan. Meliputi 2 (dua) hal yaitu: Pembinaan pengembangan SDM kepariwisataan dan peraturan yang menjadi acuan atau panduan pembinaan SDM Kepariwisata. Hasil dari strategi sebagai kebijakan dalam aspek pembinaan yang dilakukan sudah optimal tetapi perlu dilakukan secara langsung di setiap destinasi dan adanya peraturan yang jadi acuan dalam pembinaannya sudah diatur dengan baik hanya saja perlu dijabarkan secara dalam bentuk petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak).

- a) pembinaan pengembangan SDM kepariwisataan, pola pembinaan yang dilakukan, meliputi; (a) Pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), terdiri atas; (1) Dasar hukum yaitu UU No 10 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Bekasi No.2 Tahun 2018; (2) Perda Kabupaten Bekasi No.2 Tahun 2018; (b) Pelatihan dasar SDM kepariwisataan, terdiri atas; (1) Pelatihan terkait dengan 7 sapa pesona; (2) Pelatihan pengelolaan manajemen dan pelayanan kepariwisataan; (c) Monitoring dan evaluasi terdiri atas ; (1) Laporan kegiatan rapat pengembangabn SDM kepariwisataan; (2) Sertifikasi pelatihan SDM (*Tour Guide*, Skill Kepariwisataan)

.Berdasarkan pola pembinaan diatas, menunjukkan bahwa pola pembinaan pengembangan SDM kepariwisataan sudah optimal secara keseluruhan setiap

destinasi wisata di Kabupaten Bekasi, akan tetapi perlu juga dilakukan secara langsung di setiap lokasi destinasi wisata, khususnya wisata Kawung Tilu.

- b) peraturan yang menjadi acuan atau panduan pembinaan SDM Kepariwisata. Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan SDM kepariwisataan yang meliputi; (a) undang-undang khususnya Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan; (b) Peraturan Daerah (Perda) yang terdiri Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bekasi No.3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dan Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bekasi No.2 Tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Bekasi tahun 2018-2025.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa peraturan yang menjadi acuan/panduan pembinaan SDM kepariwisataan sudah diatur dengan baik hanya perlu dijabarkan dalam bentuk petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak).

3. Strategi sebagai program. Ada 6 (enam) aspek yang meliputi: Rapat Perencanaan, dokumen perencanaan, rapat koordinasi rutin (bulanan), peningkatan jumlah pengunjung objek wisata, monitoring dan evaluasi dan program diklat SDM kepariwisataan. Hasil dari strategi sebagai program yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi yang terdapat pada enam (6) aspek tersebut. Pada aspek rapat perencanaan yang dilakukan sudah optimal akan tetapi perlu juga dalam pelaksanaan rapat perencanaannya melibatkan beberapa orang yang memiliki kemampuan khusus dalam hal pengembangan SDM kepariwisataan, dokumen yang direncanakan oleh pemerintah daerah namun selebihnya destinasi wisata menjalankan program kepariwisataannya disesuaikan dengan karakteristiknya tetapi sinergitas antara pemerintah dan destinasi wisata tetap berjalan, rapat rutin dalam pelaksanaannya hanya sebatas rapat internal masing-masing saja, program peningkatan jumlah pengunjung yang dilakukan dalam promosinya masih kurangnya inovasi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan masih belum optimal hal itu dikarenakan koordinasi yang selama ini dijalankan dengan destinasi wisata dalam hal pelaporan kegiatan pariwisata

belum maksimal ,dan Program diklat yang dilakukan hanya sebatas sertifikasi diklat tour guide saja khususnya di destinasi wisata kawung tilu.

- a. Adanya rapat perencanaan,Pengembangan wisata dan SDM kepariwisataan.Pola rapat perencanaan yang dilakukan,meliputi; (a) sosialisasi,terdiri atas: (1) Teknis perencanaan dan ; (2) Kapasitas SDM kepariwisataan; (b) Pelatihan terdiri atas: (1) Pelatihan perencanaan kepariwisataan dan SDM; (2) Pelatihan sapta pesona; (c) Pembinaan meliputi; (1) Sinergitas perencanaan daerah dengan destinasi wisata dan ; (2) Koordinasi dan kunjungan langsung destinasi wisata

Berdasarkan pola rapat perencanaan diatas menunjukkan bahwa rapat perencanaan yang dilakukan sudah optimal akan tetapi perlu juga dalam pelaksanaan rapat perencanaanya melibatkan beberapa orang yang memiliki kemampuan khusus dalam hal pengembangan SDM kepariwisataan. sehingga tujuan dari tercapainya perencanaan yang berkaitan dengan SDM kepariwisataan bisa lebih optimal dan permasalahan dalam hal perencanaan pengembangan wisata dan SDM Kepariwisataan diharapkan dapat teratasi.

- b. dokumen perencanaan pengembangan wisata dan SDM kepariwisataan.ada beberapa dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan wisata dan SDM Kepariwisataan yang meliputi; (1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra); (2) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan; (3) Setiap destinasi wisata menjabarkan program kerja masing-masing sesuai dengan karakteristiknya..

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pada hakekatnya merupakan dokumen yang menentukan suatu rencana strategi kedepan atau arahan digunakan sebagai panduan dan dasar dalam pengembangan wisata dan SDM kepariwistaaan dan destinasi wisata mengikuti apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah namun selebihnya destinasi wisata menjalankan program kepariwistaannya disesuaikan dengan karakteristiknya tetapi sinergitas antara pemerintah dan destinasi wisata tetap berjalan.

- c. Rapat koordinasi rutin (bulanan) pengembangan wisata dan SDM kepariwisataan, yang dilakukan meliputi; (1) Rapat koordinasi rutin bulanan internal Dinas Pariwisata; (2) Rapat Koordinasi rutin bulanan internal destinasi wisata Kawung Tilu dan; (3) Monitoring dan Evaluasi hasil rapat rutin bulanan. Akan tetapi pola rapat rutin (bulanan) diatas, dalam pelaksanaannya hanya sebatas rapat internal masing-masing saja tidak ada koordinasi rutin (bulanan) antara Dinas Pariwisata dengan Destinasi Kawung Tilu
- d. Terjadi peningkatan jumlah pengunjung objek wisata. Pola proses program peningkatan jumlah pengunjung objek wisata yang dilakukan meliputi: (1) melakukan pameran diluar kota dengan membawa bahan-bahan promosinya untuk dipamerkan; (2) Melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dan berkolaborasi disemua lini dengan berbagai daerah dan; (3) membuat event-event promosi pariwisata untuk mendatangkan kunjungan wisatawan. Dari pola proses program peningkatan jumlah pengunjung tersebut adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di wisata Kawung Tilu yaitu pada masa pandemi *Covid-19* jumlah wisatawan yang berkunjung hanya 3000 pengunjung dan pada waktu normal jumlah kunjungan wisatawan mencapai 5000 pengunjung. Adapun dari pola proses program peningkatan jumlah pengunjung yang dilakukan Dinas Pariwisata memiliki dampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bekasi yaitu pada tahun 2020 jumlah wisatawan berjumlah 916,552 dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan dengan jumlah kunjungan mencapai 1.730.651 wisatawan.
- Berdasarkan proses program dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang dilakukan Dinas Pariwisata masih kurang maksimal karena program promosi yang dilakukan terlalu monoton dan inovasi dalam promosi yang dilakukan seperti di social media masing kurang bervariasi dan perlu adanya inovasi-inovasi yang terbaru.
- e. Adanya monitoring dan evaluasi pengembangan wisata dan SDM kepariwisataan. Pola monitoring dan evaluasi meliputi; (1) Tahapan Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari (a) Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi; (b) SK penugasan Monitoring dan Evaluasi; (c) Peninjauan lapangan ke

Destinasi wisata;(d) Laporan hasil monitoring dan evaluasi dan; (e) Rapat hasil monitoring dan evaluasi; (2) Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi terdiri atas; (a) SOP Dinas Pariwisata tentang monitoring dan evaluasi; (b) Rapat target monitoring dan evaluasi; (c) Peninjauan monitoring dan evaluasi. Akan tetapi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan masih belum optimal hal itu dikarenakan koordinasi yang selama ini dijalankan dengan destinasi wisata dalam hal pelaporan kegiatan pariwisata belum maksimal ,karena masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pariwisata kepada manajemen pengelolaan destinasi dalam hal pelaporan kegiatan pariwisata di Destinasi wisata maka perlu adanya evaluasi yang dilakukan kembali.

- f. Adanya program diklat SDM kepariwisataan secara rutin.Pola Program Diklat yang dilakukan,meliputi; (a) identifikasi kebutuhan Diklat SDM kepariwisataan; (b) Penentuan prioritas diklat; (c) Kerja sama dengan perguruan tinggi/Narasumber/BNSP;(d) pelaksanaan diklat dan sertifikasi SDM kepariwisataan;(e) Monitoring dan Evaluasi diklat.

Berdasarkan pola program diklat SDM kepariwisataan diatas menunjukkan bahwa pola program diklat yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata hanya sebatas sertifikasi diklat tour guide saja khususnya di destinasi wisata kawung tilu.belum adanya program diklat yang bervariasi karena untuk saat ini destinasi wisata Kawung Tilu belum memiliki wahana wisata yang spesifik .

Hambatan-Hambatan dalam proses pengembangan SDM pelaku pariwisata di Kawung Tilu terletak kurangnya bersinergi antara pihak destinasi wisata dengan pemerintah desa setempat yang berdampak sulitnya bantuan dana untuk pengembangan pengelolaan destinasi wisata di Kawung Tilu.Selanjutnya keterbatasan anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dalam pengembangan pariwisata dana yang dialokasikan khusus Destinasi Wisata Kawung Tilu untuk pengembangan tidak mudah untuk didapatkan,karena faktor status lahan Kawung Tilu yang masih milik perorangan bukan milik Pemerintah Daerah. maka bantuan secara besar-besaran sulit untuk didapatkan.Sehingga itu yang membuat suatu faktor permasalahan hambatan untuk pelaksanaannya dan Belum Optimalnya pengelola

wisata dalam Koordinasi pengelolaan laporan kegiatan wisatanya menjadi faktor hambatan dalam monitoring dan evaluasi dalam pengembangan SDM pelaku pariwisata .Dinas Pariwisata mempunyai tugas untuk melakukan Monitoring dan evaluasi dalam pengembangan pariwisata karena Monitoring sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dari jalannya program Dinas Pariwisata selama kegiatan program itu berjalan dan menilai pencapaian dari tujuan program tersebut ,dari masalah faktor hambatan tersebut proses evaluasi dan monitoring yang dilakukan menjadi kurang optimal.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten bekasi untuk mengatasi hambatan tersebut memberikan pembinaan kepada pengelola Destinasi wisata Kawung Tilu agar kegiatan manajemen pengelolaan bertujuan untuk membentuk personal dari Sumber daya manusia yang berkualitas dengan kemampuan kerja yang baik dan optimal selain itu meningkatkan keahlian atau skill Sumber daya Manusia yang berkaitan dengan kepariwisataan agar kualitas performa dari sumber daya manusia meningkat sehingga memberikan pengaruh manfaat bagi kemajuan pengelolaan destinasi wisata, melakukan program CSR dengan perusahaan yang ada di lingkungan Destinasi Wisata Kawung tilu untuk proses pengembangan SDM nya ,serta mendukung fasilitas infrastruktur,sarana dan prasarana yang membantu dalam proses pengembangan pariwisata,selain itu yang terakhir upaya yang dilakukan melakukan sosialisasi dalam kurang optimalnya koordinasi laporan pengelolaan kegiatan wisata yang ada dikawung tilu karena Sosialisasi merupakan proses belajar yang memperkenalkan suatu sistem kepada individu atau kelompok Sosialisasi merupakan suatu sistem yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat.Dengan adanya sosialisasi tujuan dari hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata akan terlaksana dengan baik dan sosialiasi merupakan unsur penting dalam menentukan berhasil dan tidaknya dari proses penyampaian pesan dari tujuan tersebut.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi akademik

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Kepariwisata di Destinasi Wisata Kawung Tilu Bojong Rangkas Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur” maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut”

1. Kerja sama antara pihak pengelola, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, pihak swasta dalam melaksanakan program pengembangan pariwisata agar pelaksanaannya berjalan dengan lebih optimal dan lebih berdampak untuk masyarakat.
2. Penguatan kordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pihak pengelola agar tujuan dari kegiatan pengembangan SDM pelaku pariwisata di Kawung Tilu dapat hasil yang maksimal.
3. Memfokuskan dan memaksimalkan program sosialisasi dan pembinaan SDM pelaku pariwisata karena jika tujuan program tersebut berhasil dan hasil yang didapatkan dengan optimal maka akan berdampak besar bagi perubahan dan kemajuan pariwisata di Kabupaten Bekasi.

5.2.1 Rekomendasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi, masukan, ilmu dan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah.